

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

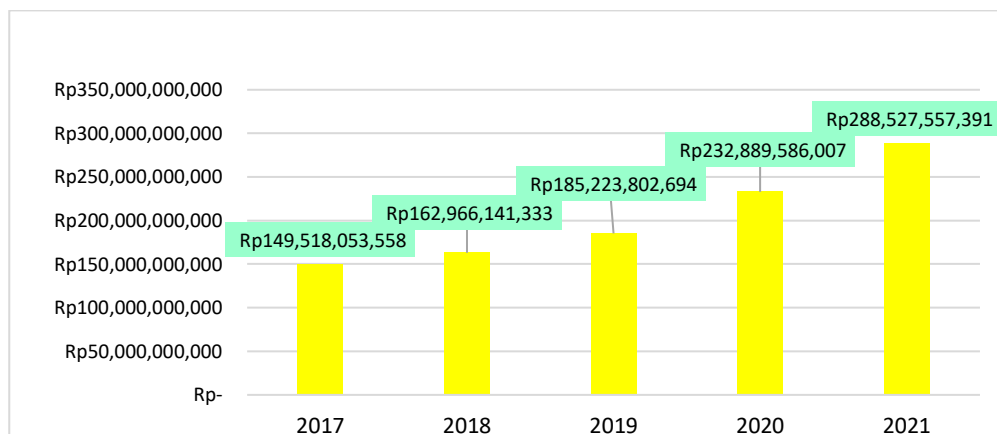
### **1.1 Latar Belakang**

Terjadinya globalisasi ekonomi yang menyebabkan segala bentuk aktivitas ekonomi yang menunjukkan integrasi pasar antar-negara menjadi tanpa hambatan batas teritorial dalam batasan wilayah dan perwilayahan, sehingga konsep dalam gejala globalisasi ekonomi tampak pada sektor produksi, keuangan, investasi, dan perdagangan yang berpengaruh pada hubungan antarnegara. Hal ini menyebabkan seringkali terjadi kesalahan dalam penyampaian informasi baik dari pihak pengirim maupun penerima sehingga diperlukannya konfirmasi atas asersi manajemen guna meyakinkan pihak-pihak yang terkait untuk menghindari asimetri informasi, maka dibutuhkan audit atas laporan keuangan.

Profesi akuntan publik salah satu profesi yang dipercaya oleh publik dapat memberikan rasa keyakinan dan kepercayaan bagi pemilik perusahaan terkait proses dan pemberian opini audit atas laporan keuangan perusahaan. Menurut Arens (2015:168) pentingnya pelaksanaan audit bertujuan untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku, mengingat bahwa laporan keuangan bermanfaat bagi pihak intern atau pihak ekstern.

Dalam proses pengauditan diperlukan pemeriksaan yang sistematis dan independensi untuk menentukan aktivitas, mutu dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang telah dirancang serta apakah rancangan sudah diterapkan telah berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini berhubungan dengan kualitas dari auditor yang dikontrak oleh suatu perusahaan, untuk menunjukan auditor yang berkualitas, maka *Fee* audit perlu diperhitungkan dari berbagai prosedur yang dilalui seperti dalam operasional aktivitas, pencarian bahan bukti audit dan lain-lain, terutama jika diperlukan sebuah keahlian profesional seperti dalam mengaudit sebuah sistem

informasi dari sebuah sistem yang diterapkan oleh suatu perusahaan. *Fee* audit adalah imbalan dari penerima jasa kepada akuntan publik atas jasa audit yang dilakukan (Agun et al., 2021). Seorang auditor yang memiliki pengalaman tentu akan menggunakan tarif yang relatif tinggi, karena auditor profesional memiliki tim dan jam kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan auditor yang baru memulai karirnya. Maka dari itu penentuan *Fee* audit merupakan hal yang sangat krusial. Dengan adanya pandemic Covid-19, terjadi perubahan ekonomi yang tentu berdampak pada semua perusahaan baik klien ataupun perusahaan audit yang akhirnya *Fee* audit atau imbalan jasa yang diterima oleh auditor mengalami penurunan. Walaupun fenomena yang terjadi pada keseluruhan sektor perusahaan adalah penurunan *Fee* audit di masa pandemi, akan tetapi pada kenyataannya besaran *Fee* audit pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama 5 tahun terakhir (2017-2021) mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Oleh karena itu besaran *Fee* audit pada BUMN di Indonesia masih menjadi perbincangan yang cukup serius. Berikut ini merupakan grafik kenaikan total *Fee* audit yang diterima oleh KAP setelah melakukan audit di perusahaan BUMN. Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa *Fee* audit yang diperoleh KAP terus mengalami peningkatan. Total pendapatan KAP pada tahun 2021 meningkat sebesar 55 miliar rupiah atau setara dengan 23,8% dari total pendapatan *Fee* audit KAP tahun sebelumnya



**Gambar 1.1 Grafik Kenaikan Total *Fee* Audit pada BUMN 2017-2021**

*Sumber: data diolah oleh penulis (2023)*

Selain itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini memiliki karakteristik yang dan sektor industri yang berbeda-beda, karena tentunya basis utama Penentuan *Fee* Audit ini kesepakatan antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dan perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa indikator utama yang dilakukan KAP adalah ke basis resiko, sementara indikator yang digunakan oleh perusahaan adalah basis kepada standar satuan belanja atau standar anggaran. Maka dapat dilihat bahwa proses atau penetapan *Fee* audit ini sangat beragam, selain itu berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis dalam laporan keuangan perusahaan BUMN, besaran *Fee* audit minimum adalah Rp159.500.000 dikeluarkan oleh PT. Taspen tahun 2018 dan sedangkan besaran *Fee* audit maksimumnya sebesar Rp70.590.000.000 yang dikeluarkan oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk. Pada tahun 2021, sehingga didapatkan nilai rata-rata berbeda dan adanya kesenjangan besaran *Fee* audit ini dikarenakan pada BUMN ini terdapat beberapa jenis perusahaan yang beragam serta banyak faktor-faktor yang mempengaruhi besaran *Fee* audit.

Pedoman pembayaran *Fee* audit sudah diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), IAPI mengeluarkan pedoman bagi seluruh anggota IAPI (akuntan publik) mengenai ketentuan besarnya *Fee* audit yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan *Fee* Audit Laporan Keuangan. Peraturan ini memuat indikator batas bawah tarif *Fee* Audit laporan keuangan atau *Fee* audit per jam setiap proses audit yang akan dibebankan KAP kepada *auditee* berdasarkan klasifikasi berjenjang atau tingkatan staf yang dipekerjakan selama proses audit. Peraturan IAPI tersebut membolehkan KAP untuk menentukan nilai imbalan jasa per jam yang lebih tinggi dari nilai yang sudah ditetapkan sesuai kondisi dan karakteristik yang berbeda-beda. tetapi kenyataannya biaya audit yang dibayarkan perusahaan bervariasi, sehingga sampai saat ini menjadikan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya *Fee* atas jasa audit laporan keuangan perusahaan menarik untuk diteliti. Selain itu penetapan *Fee* audit juga dilakukan secara subjektif oleh perusahaan, tinggi atau rendahnya besarnya *Fee* audit dari jasa audit yang didapatkan perusahaan oleh auditor independen

berkaitan erat juga dengan kemampuan tawar-menawar yang dilakukan diantara klien dan auditor.

Menurut penelitian Pradana (2016), besar kecilnya biaya audit ditentukan oleh tiga aspek, antara lain: 1) Aspek *auditee* / klien, 2) Aspek auditor, dan 3) atribut perjanjian, hal ini dibuktikan pada penelitian yang dilakukan Hay (2010). Hay menggunakan faktor *client attributes*, *auditor attributes*, dan *engagement attributes* sebagai penelitian, dalam penelitian ini penulis akan menguji beberapa faktor yang digunakan oleh Hay (2010) sebagai acuan pengujian pada perusahaan BUMN di Indonesia. Pada Aspek Klien dapat diukur dengan indikator risiko audit (Sukrisno, 2014) Semakin tinggi risiko penugasan audit semakin tinggi pula upaya audit untuk memberikan opini audit yang sesuai disesuaikan dengan jumlah *Fee* audit yang sudah disepakati bersama (Pertiwi, 2019). Jenis risiko yang melekat pada perusahaan adalah risiko *inherent*, merupakan risiko yang dinilai oleh auditor sebelum mempertimbangkan efektifitas pengendalian internal perusahaan, risiko *inherent* ini terbagi ke dalam 2 jenis yaitu risiko keuangan dan *non* keuangan. Simunic (1996) mencoba memformulasikan faktor-faktor yang mempengaruhi *Fee* audit dalam risiko keuangan dan menghasilkan suatu model yang menyatakan bahwa *Fee* audit ditentukan oleh besar-kecilnya perusahaan yang diaudit (Ukuran Perusahaan). Ukuran Perusahaan yang sedang diaudit oleh auditor atau Kantor Akuntan Publik adalah faktor penentu yang paling penting dalam menentukan *Fee* audit, dan merupakan salah satu risiko *inherent* perusahaan jenis keuangan. Ukuran perusahaan dapat dilihat berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan Sari (2021). Berdasarkan penelitian Sari (2021) tersebut menyatakan bahwa Semakin besar total aktiva semakin besar audit *Fee* yang dibayarkan perusahaan, hal ini disebabkan karena perusahaan besar akan memiliki transaksi yang besar pula sehingga waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan audit lebih lama.

Selain Ukuran Perusahaan (*size*), Perusahaan yang memiliki anak perusahaan dinilai memiliki risiko *inherent* perusahaan jenis *non*-keuangan yang tinggi (Nugrahani & Sabeni, 2013). Menurut Beams (2000), perusahaan yang memiliki jumlah anak perusahaan yang banyak di dalam negeri maka transaksi yang dilakukan perusahaan tersebut akan semakin rumit karena perlu membuat laporan

konsolidasi. Penelitian Hay et al. (2006) juga menyatakan terdapat hubungan yang positif signifikan antara anak perusahaan dengan besar penetapan *Fee* audit eksternalnya. Semakin kompleks klien, semakin sulit untuk mengaudit dan akan membutuhkan waktu yang lebih lama pula. Hal tersebut berakibat pada *Fee* audit yang semakin tinggi. Sehingga keberadaan anak perusahaan akan mempengaruhi penetapan *Fee* audit eksternal.

Penentuan *Fee* Audit juga dapat dilihat melalui Aspek Auditor yaitu Reputasi Auditor, karena auditor yang bereputasi baik memiliki keahlian audit yang lebih tinggi dan akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik pula dengan begitu perusahaan dapat menarik calon investor sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan akan meningkat (Nugrahani & Sabeni, 2013). Reputasi Auditor yang tinggi adalah KAP yang berafiliasi dengan *Big 4*. Oleh karena itu *Fee* audit KAP *Big 4* lebih tinggi dibandingkan *non-big 4*, oleh karena itu, pernyataan ini didukung oleh penelitian Sinaga & Rachmawati (2018). Pernyataan tersebut sejalan juga dengan beberapa penelitian yaitu Ukuran KAP atau Reputasi Auditor memiliki pengaruh positif terhadap *Fee* Audit (Nisak, 2020; Pertiwi, 2019; Yulianti et al., 2019). Akan tetapi terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suharli (2008) dan Sari (2021), penelitian tersebut menyatakan bahwa Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Fee* audit pada perusahaan BUMN sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penetapan *Fee* audit tidak dilihat dari besarnya kantor akuntan publik, melainkan kualitas jasa audit yang diberikan.

Adapun fenomena pada perusahaan BUMN yang berkaitan dengan Reputasi Auditor yaitu banyaknya perusahaan BUMN yang tersandung kasus-kasus laporan keuangan, artinya banyak Kantor Akuntan Publik yang bereputasi tinggi tidak dapat mengungkapkan fraud atau kesalahan pada laporan keuangan BUMN sehingga dapat dinilai bahwa besaran *Fee* audit yang tinggi yang diterima oleh KAP tersebut kurang profesional. Pada 8 Oktober 2018 lalu Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi administratif ke Akuntan Publik (AP) Marlinna, AP Merliyana Syamsul dan KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan, mitra Deloitte Indonesia. Langkah ini diambil regulator berkaitan dengan hasil pemeriksaan terhadap SNP Finance. Selain itu

pada Juni 2019, ditemukan fakta bahwa Garuda Indonesia kesalahan pengakuan pendapatan sehingga hal tersebut berdampak pada Laporan Laba Rugi Garuda. Kemudian kementerian Keuangan mengumumkan sanksi yang dijatuhkan pada Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan atas kesalahan audit pada Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018. Dengan terbongkarnya kasus yang terjadi di maskapai Garuda, maka dinilai menjadi pintu masuk pengungkapan masalah-masalah yang terjadi di BUMN, seperti dugaan gagal bayar Asuransi Jiwasraya dan dugaan korupsi di Krakatau Steel, Waskita, serta Bank Tabungan Negara (BTN). Walaupun Industri Kantor Akutansi Publik (KAP) bereputasi tinggi seperti *big Four* dan *big ten* ikut tersandung dalam berbagai kasus kasus yang ada, karena telah banyak mengaudit Laporan Keuangan perusahaan BUMN di Indonesia, Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Tarkosunaryo menilai peta industri KAP di tanah air tidak banyak berubah. Lantaran masih dipimpin oleh *big Four* yakni Ernst & Young, PwC, Deloitte, dan KPMG, serta diikuti oleh KAP *big ten*.

Aspek lainnya yang mempengaruhi besaran *Fee* audit yang tidak kalah pentingnya adalah atribut perjanjian atau *engagement attributes*, Adminardi (2019) menyatakan bahwa atribut perikatan ini dapat dinilai berdasarkan audit *Tenure* atau rotasi auditor. Audit *Tenure* merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin antara auditor dari sebuah kantor akuntan publik (KAP) dengan *auditee* yang sama (Werastuti, 2013). Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi kasus-kasus audit di Indonesia, maka IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) mulai mengeluarkan himbauan rotasi untuk KAP agar masa perikatan auditor dapat dibatasi dengan adanya rotasi tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menilai atribut perjanjian melalui audit *Tenure* untuk mengetahui pengaruhnya terhadap *Fee* Audit Laporan Keuangan.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Perusahaan, Reputasi Auditor, Dan Audit *Tenure* Terhadap *Fee* Audit Laporan Keuangan atau *Fee* audit, kemudian berdasarkan fakta dilapangan menyatakan bahwa Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) saat ini terdiri 12 jenis kluster usaha yang berbeda-beda, Adapun kluster usahanya terbagi 2 yaitu Industri dan Jasa. Pada kluster industri dimulai dengan industri kesehatan, manufaktur, mineral dan batubara, pangan dan pupuk, perkebunan dan hutan, jasa energi, minyak, dan gas. BUMN dengan kluster usaha juga terdiri dari jasa keuangan, jasa telekomunikasi dan media, jasa Infrastruktur, jasa logistic, jasa pariwisata, jasa asuransi dan dana pensiun (BUMN, 2023). Sehingga perbedaan ukuran dan kompleksitas pada BUMN berbeda-beda dan akan mempengaruhi besaran *Fee* audit. Dalam proses Audit Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta anak perusahaan dan perusahaan afiliasi yang terkonsolidasi ke BUMN untuk diberlakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangannya akan dilakukan hanya oleh 12 Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berafiliasi dengan KAP dengan reputasi tinggi di dunia, baik *big 4* maupun *non big 4*. Hal itu tertuang dalam lampiran surat tabulasi Data KAP pada BUMN Nomor S -199/MBU/DKU/08/2021 tertanggal 31 Agustus 2021. Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas penting untuk dilakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Perusahaan, Reputasi Auditor, Dan Audit *Tenure* Terhadap *Fee* Audit Laporan Keuangan (Studi Kasus pada BUMN di Indonesia)"**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh positif Ukuran Perusahaan terhadap *Fee* Audit pada perusahaan BUMN di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh positif Kompleksitas Perusahaan terhadap *Fee* Audit pada perusahaan BUMN di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh positif Reputasi Auditor terhadap *Fee* Audit pada perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh negatif Audit *Tenure* terhadap *Fee* Audit pada perusahaan BUMN di Indonesia?

### 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif Ukuran Perusahaan terhadap Imbalan Jasa Audit pada perusahaan BUMN di Indonesia
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif Kompleksitas Perusahaan terhadap Imbalan Jasa Audit pada perusahaan BUMN di Indonesia
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh positif Reputasi Auditor terhadap Imbalan Jasa Audit pada perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh negatif Audit *Tenure* terhadap Imbalan Jasa Audit pada perusahaan BUMN di Indonesia

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun dengan adanya pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1.4.1 Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap wawasan akuntansi auditing, terutama mengenai *Fee Audit* dipengaruhi oleh beberapa faktor yang disebutkan penulis dalam penelitian ini yaitu antara lain Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Perusahaan, Reputasi Auditor, dan Audit *Tenure* (Studi Kasus pada BUMN di Indonesia). Selain itu diharapkan dalam penelitian dapat dijadikan sebagai referensi serta menambah khasanah penelitian untuk dikembangkan pada penelitian selanjutnya.

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis.

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan mempertimbangkan kebijakan yang akan digunakan perusahaan BUMN terkait keputusan dalam memutuskan *Fee* auditor selain itu penelitian ini dapat dijadikan untuk memprediksi besaran *Fee Audit* yang akan berikan oleh Kantor



Akuntan Publik ditinjau melalui Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Perusahaan, Reputasi Auditor, dan Audit *Tenure*.

2. Penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh Kantor Akuntan Publik dan audit, agar saat mendapatkan tugas audit dapat menentukan dan menerima *Fee* audit dengan profesional, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada pada perusahaan, auditor maupun perikatan.